

Ikrar Tenurial Hutan bagi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal



Laporan Tahunan 2025–2026 RINGKASAN EKSEKUTIF

Ikrar COP26 tentang Tenurial Hutan bagi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal berakhir pada Desember 2025. **Selama periode tersebut, para pendukung Ikrar COP26—yang secara kolektif dikenal sebagai Forest Tenure Funders Group (FTFG)—telah menyalurkan dana sebesar \$2,35 miliar dari total komitmen \$1,7 miliar, melampaui target sebesar 38%.**

Dalam beberapa dekade sebelumnya, jaminan tenurial lahan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (MA dan KL) menerima dukungan yang jauh lebih sedikit daripada yang dibutuhkan, mengingat hanya sedikit investasi yang memberikan manfaat lebih besar bagi iklim, keanekaragaman hayati, hak asasi manusia, dan mata pencaharian berkelanjutan. Ikrar COP26 berusaha menanggapi hal ini. Para donor tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas hasil Ikrar COP26. Penghargaan harus diberikan kepada mitra-mitra kami, terutama Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, yang melaksanakan pekerjaan ini dan mencapai dampak nyata melalui advokasi selama puluhan tahun serta upaya pertahanan dan pengelolaan wilayah setiap hari.

Saat diumumkan pada November 2021, Ikrar COP26 menegaskan apa yang telah diketahui oleh jutaan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal: Perlindungan hutan memerlukan dukungan bagi para penjaga hutan serta jaminan hak-hak tenurial mereka. Ikrar COP26 membantu menggeser isu tenurial hutan dari posisi pinggiran dalam aksi iklim dan keanekaragaman hayati menjadi pusat perhatian; komitmen ini juga membuka ruang politik bagi pemerintah untuk melaksanakan upaya jaminan hak-hak tenurial. Terdapat pergeseran yang nyata pada UNFCCC COP30 dengan diumumkannya Forest & Climate Leaders' Partnership (FCLP) Intergovernmental Land Tenure Commitment (ILTC) pada tahun 2025. Pemerintah negara-negara dengan hutan tropis berkomitmen untuk mengakui dan memperkuat 160 juta hektar lahan milik Masyarakat Adat, Komunitas Lokal, dan Masyarakat Keturunan Afrika hingga tahun 2030.

Masyarakat telah mengelola dan merawat wilayah mereka selama berabad-abad, namun ancaman yang semakin meningkat membuat keamanan hak tenurial menjadi lebih mendesak dari sebelumnya. Tanpa hak yang diakui dan dapat ditegakkan, mereka lebih rentan terhadap pengusiran, perampasan, kekerasan, dan aktivitas ilegal. Keamanan hak tenurial bersifat multidimensi. Fondasinya adalah pengakuan hukum, namun hak-hak tersebut harus diwujudkan dalam praktik. Untuk mencapainya, masyarakat memerlukan lembaga, sumber daya, dan informasi guna mengelola, memelihara, dan melindungi wilayah mereka. Pada gilirannya, keamanan hak tenurial memerlukan dukungan yang terperinci melalui berbagai saluran: menciptakan kondisi yang mendukung—mulai dari kebijakan nasional dan reformasi hukum hingga sistem pemerintah yang melaksanakannya; pembiayaan yang andal, jangka panjang, dan berkualitas tinggi bagi organisasi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal; serta kerja teknis bersama masyarakat, termasuk pemetaan dan demarkasi, bantuan hukum, perencanaan pengelolaan wilayah, dan pemantauan. Secara terpisah, tidak satu pun dari hal ini cukup, dan Ikrar COP26 membantu menunjukkan bahwa semuanya harus digabungkan.



Pada tahun 2025, pendanaan yang selaras dengan Ikrar COP26 terkonsentrasi pada tema dan wilayah geografis yang jelas. Secara keseluruhan, pengelolaan wilayah dan keamanan hak tenurial (33%) serta pengelolaan hutan berkelanjutan dan mata pencaharian berbasis hutan (33%) menyumbang hampir dua pertiga dari pendanaan tahun 2025, sementara dukungan untuk proses reformasi hak atas tanah nasional meningkat menjadi \$47 juta dari \$26 juta pada tahun 2024. Secara regional, Amerika Latin menerima 71% dari pendanaan non-global, diikuti oleh kawasan Asia-Pasifik (16%) dan Afrika (13%).

Meskipun Ikrar COP26 tidak secara khusus menyebutkan pembiayaan langsung, para anggota FTFG menanggapi kebutuhan mitra dan semakin mengutamakan pembiayaan langsung selama periode lima tahun Ikrar tersebut. Para anggota juga mempelajari cara-cara untuk meningkatkan efektivitas penyaluran dana kepada masyarakat. Sepanjang masa pelaksanaan Ikrar COP26, pembiayaan langsung kepada organisasi-organisasi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal meningkat baik dari segi volume maupun jangkauannya. **Pendanaan yang menjangkau organisasi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal secara langsung meningkat dari 2,9% dari total pendanaan yang dilaporkan pada tahun 2021 menjadi 7,2% pada tahun 2025; dan para anggota melaporkan dukungan langsung kepada setidaknya 135 organisasi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal pada tahun 2025, dibandingkan dengan hanya 22 organisasi pada tahun 2021.** Yang tak kalah pentingnya, ekosistem dana yang dipimpin oleh Masyarakat Adat dan berbasis wilayah yang terus berkembang telah membuka pilihan strategis baru bagi para donor, serta menawarkan jalur pembiayaan kepada masyarakat yang dirancang dan dikelola oleh gerakan mereka sendiri, yang akan menjadi kunci keberhasilan Ikrar COP30 yang diperbarui.

Kemajuan dalam bidang kesetaraan gender dan dukungan bagi pemuda belum merata, dan diperlukan upaya yang lebih terfokus. Hanya 4% dari pendanaan tahun 2025 yang menjadikan gender sebagai tujuan utama, turun dari 14% pada tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh dua faktor: komitmen gender berskala besar dan berjangka panjang telah dihitung pada tahun-tahun sebelumnya, serta portofolio yang berfokus pada gender dari salah satu donor berakhir pada akhir tahun 2025. Kurang dari 1% pendanaan memiliki pemuda sebagai tujuan utama. Persentase untuk kedua bidang pendanaan ini harus ditingkatkan pada periode COP30. Namun, perlu dicatat bahwa kemajuan penting dalam pengarusutamaan gender telah dicapai: Pada tahun terakhir periode Ikrar COP26, lebih dari 60% dana mengintegrasikan gender sebagai tujuan yang signifikan.

Pemerintah dan donor filantropi menyalurkan dana dengan cara yang berbeda, terutama karena mereka beroperasi di bawah aturan dan batasan yang berbeda. Donor publik mengelola uang pembayar pajak dan oleh karena itu terikat oleh aturan anggaran publik, standar fidusia, persyaratan pengadaan, serta kewajiban manajemen keuangan dan akuntansi yang terperinci. Meskipun hal ini sering kali menyulitkan pengelolaan sejumlah besar hibah kecil secara langsung, donor publik dapat memobilisasi pendanaan dalam skala yang lebih besar melalui perantara yang mampu mengelola persyaratan kepatuhan dan menyalurkan kembali dana kepada organisasi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Karena memiliki fleksibilitas yang lebih besar, filantropi swasta cenderung bekerja sama dengan aktor lokal dan masyarakat sipil; filantropi ini dapat mendukung inisiatif inovatif yang didorong oleh masyarakat, merespons kebutuhan lokal dengan cepat, serta membangun kemitraan erat yang memperkuat kepemilikan dan dampak di tingkat akar rumput, termasuk melalui proyek-proyek berskala kecil atau eksperimental.



FTFG mencakup kedua jenis donor tersebut, sehingga upaya mereka saling melengkapi dan memfasilitasi berbagai dimensi yang diperlukan untuk mencapai jaminan hak

tenurial. Seluruh anggota FTFG menyadari bahwa Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal harus memperoleh manfaat dari pendanaan yang berbasis hak, andal, berjangka panjang, dan fleksibel. Mereka menggunakan berbagai saluran untuk mencapai tujuan tersebut dan berupaya mengukur kemajuan melalui persentase pendanaan langsung, dengan menyadari bahwa persentase tersebut tidak mencakup seluruh aspek pendanaan berkualitas tinggi bagi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal.

Lima tahun praktik kolektif telah menghasilkan pelajaran berharga lainnya. **Yang pertama adalah bahwa hak tenurial kini telah bergeser dari pinggiran strategi iklim dan konservasi ke pusat perhatian.**

Yang kedua adalah bahwa pengakuan hukum memang diperlukan, tetapi tidak cukup.

Hasil yang berkelanjutan bergantung pada lembaga yang kokoh dan representatif, pengelolaan wilayah yang berfungsi dengan baik, pembiayaan berkelanjutan, sistem pemantauan, serta kemampuan untuk merespons ancaman.

Ketiga, para donor berupaya beradaptasi dengan realitas komunitas dengan menyediakan akses pendanaan baik secara langsung maupun melalui sekutu, mitra, dan perantara

tepercaya. Mereka menawarkan dukungan pengembangan kapasitas agar organisasi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dapat membangun ketahanan administratif. Para donor juga membiarkan mitra memilih jalur pendanaan mereka sendiri dan berinvestasi pada dana yang dipimpin oleh Masyarakat Adat dan berbasis wilayah yang berkembang selama periode Ikrar COP26.

Pelajaran keempat adalah bahwa akuntabilitas terkait erat dengan transparansi. Karena hasil Ikrar COP26 dipublikasikan dan dilaporkan setiap tahun, gerakan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dapat menggunakan instrumen yang berulang serta berdasarkan bukti ini untuk menagih komitmen para penyandang dana. Siklus pelaporan bersama ini mendorong para donor untuk meninjau portofolio mereka sendiri dan mengidentifikasi celah dalam program terkait pendanaan langsung, cakupan regional, gender, dan pemuda.

Pekerjaan ini kini berlanjut dengan komitmen yang lebih luas. **Pada KTT Pemimpin Dunia bulan November 2025 di Belém, 39 donor dari pemerintah dan lembaga filantropi berkomitmen menyalurkan \$1,8 miliar untuk Ikrar Tenurial Hutan dan Lahan bagi Masyarakat Adat, Komunitas Lokal, dan Masyarakat Keturunan Afrika dalam COP30.** Ikrar COP30 yang baru ini mencakup tidak hanya hutan, tetapi juga semua ekosistem daratan yang relevan.

Pendekatan yang lebih luas ini mencerminkan kebutuhan yang sangat besar akan dukungan keamanan hak tenurial di seluruh ekosistem. **Keamanan hak tenurial masyarakat semakin diakui sebagai landasan di ketiga Konvensi Rio:** UNCCD mengakui keamanan hak tenurial sebagai hal yang krusial untuk menghentikan degradasi lahan dan memulihkan lanskap yang terdegradasi; CBD dan Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Globalnya mengikat pemerintah untuk melestarikan 30% daratan dan perairan pada tahun 2030 sambil mengakui wilayah-wilayah Adat dan tradisional; dan dalam UNFCCC, pembukaan Perjanjian Paris menyerukan kepada Para Pihak untuk menghormati hak-hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal saat mengambil tindakan iklim.



Lima tahun lalu, Ikrar COP26 berupaya membuktikan bahwa komitmen publik yang transparan dapat mengubah cara dunia mendanai hak tenurial. Hal itu berhasil. Dan Masyarakat Adat, Komunitas Lokal serta mitra mereka mengubah pendanaan tersebut menjadi wilayah yang diakui, lembaga yang lebih kuat, serta tempat di pusat agenda global. **Ikrar COP30 diluncurkan dengan saluran penyampaian yang telah terbukti, ekosistem dana yang dikelola Masyarakat Adat dan komunitas yang terus berkembang, kemitraan yang lebih dalam, serta basis bukti bersama. Sebuah rencana ambisius menjadi pedoman bagi lima tahun ke depan kami.** Kami bertujuan untuk mendukung upaya-upaya yang mengatasi faktor-faktor sistemik penyebab ketidakpastian hak tenurial, mengarahkan lebih banyak dana agar sampai ke masyarakat sesuai dengan ketentuan mereka sendiri, serta memperkuat kemitraan yang menanamkan keamanan hak tenurial di seluruh inisiatif global dan regional yang melindungi alam dan manusia.